



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR - PROVINSI JAWA BARAT**

TANGGAL 17 NOVEMBER S.D. 19 NOVEMBER 2022

**MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2022 – 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA
KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR - PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 17 NOVEMBER S.D. 19 NOVEMBER 2022

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai amanat konstitusi UUD RI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat adalah penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki tugas guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Pancasila sila ke 4 (empat) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tertuang dalam pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR - RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR - RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan pada kunjungan kerja spesifik pada masa sidang ini adalah terkait antisipasi pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap ancaman resesi ekonomi global tahun 2023.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini, kondisi ekonomi global memperlihatkan wajah yang tidak cukup baik. Terlebih pasca pandemi covid, ditambah terjadinya perang rusia-ukraina yang memperparah gangguan rantai pasokan dan meningkatnya harga komoditas energy dan pangan. Sejumlah lembaga asing yaitu World Bank, IMF, ADB dan OJK memperkirakan ancaman resesi global pada 2023. Resesi dinilai sebagai awan gelap dalam perekonomian setiap negara. Resesi ekonomi global tidak saja terjadi di negara maju, tapi juga di negara berkembang termasuk Indonesia yaitu menurunnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini sudah mulai dirasakan Indonesia dengan mulai dilakukannya pengurangan

pekerja baik PHK, tidak diperpanjangnya kontrak dan pengakhiran PKWT terutama pada sektor textile, manufactur, akomodasi/restoran, dan sektor lainnya. pengurangan pekerja paling banyak di sektor textile mencapai 54,15 persen, diikuti manufactur sebanyak 23,80 persen.

Sinyalemen penurunan omzet perusahaan di beberapa sektor yaitu sektor textile (TPT) dan manufacture di tandai dengan penurunan permintaan mencapai hingga 50 persen. Hal ini tentunya berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Akibat penurunan ini, perusahaan mulai mengurangi operasional produksi yang berdampak pada pengurangan hari kerja, jam kerja hingga pengurangan pekerja. Catatan Apindo, pengurangan pekerja khusus di Jawa Barat saja, per oktober lalu hampir mencapai 80 ribu. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Selain melakukan pengurangan pekerja, perusahaan juga melakukan realokasi ke daerah lain sebagai dampak penurunan permintaan. Tindakan realokasi perusahaan ke daerah dengan biaya operasional yang lebih murah, dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke perusahaan tersebut. kasus ini sudah mulai terjadi seperti perusahaan di Banten yang melakukan realokasi ke Jawa Tengah.

Dari sisi sosial, pengurangan pekerja terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, dapat mengganggu stabilitas sosial karena terdesak harus memenuhi kebutuhan yang tidak bisa di tunda. pengurangan pekerja lama kelamaan menimbulkan pengangguran massal yang bisa mengancam tatanan sosial kehidupan masyarakat baik dalam lingkup bangsa maupun negara.

Sementara dampak resesi bagi pemerintah, peningkatan angka pengangguran menjadi beban baru. Dalam kondisi yang baru puih, pemerintah dipaksa harus menopang dan menghasilkan solusi untuk segera mengakhiri resesi. Dalam kondisi ini, pemerintah pun membutuhkan anggaran untuk berbagai masalah yang muncul. Namun di sisi lain penerimaan negara juga turun karena objek pajaknya mengalami penurunan kinerja. Artinya, keuangan negara juga dalam kondisi yang tidak baik. Tak jarang dalam kondisi ini pemerintah terpaksa menarik utang demi membiayai kebutuhan masyarakatnya.

Ditambah kondisi ekonomi saat ini yang baru mulai tumbuh, dan masih menyisakan persoalan angka pengangguran yang masih tersisa akibat covid selama 2 tahun kemarin ditambah jumlah angkatan kerja baru yang lahir sebanyak 3 juta tiap tahun, di satu sisi, kita dihadapkan pada era pasar bebas dan revolusi industry, serta bonus demografi di tahun 2030. Sehingga tentunya menjadi pekerjaan yang cukup membutuhkan energy

bagi pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di atas.

Provinsi Jawa Barat sendiri, dengan 27 kabupaten/kota, berpenduduk 48,7 juta (data BPS 2021), jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 48,27 juta, dimana 24,7 juta atau 50 persen merupakan jumlah angkatan kerja dan 22,3 juta merupakan pekerja dan pengangguran sebanyak 2,4 juta. Komposisi penduduk bekerja didominasi pekerja yang bekerja pada lapangan pekerjaan industry pengolahan. Dari jumlah penduduk di Jawa Barat, Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 5,4 juta. Sementara jumlah perusahaan yang ada di Jawa Barat di tahun 2020, terbanyak adalah perusahaan skala mikro yaitu sebanyak 584 ribu, dan skala kecil berjumlah 625 ribu perusahaan. Perusahaan di Jawa Barat yang terbanyak melakukan PHK adalah industry tekstil (TPT) mencapai 54,15 persen. Berdasar data Apindo, jumlah pengurangan pekerja di Jawa Barat hampir mencapai 80 ribu dimana terbanyak ada di Kabupaten Bogor dengan 23 ribu pekerja, diikuti kabupaten Sukabumi dengan 19 ribu pekerja. sementara perusahaan yang menghentikan operasional dan produksinya, terbanyak ada di Kabupaten Bogor, yaitu 9 perusahaan dengan total pekerja 5.300, diikuti 4 perusahaan berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Sementara berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang ter PHK sebagaimana data wajib lapor perusahaan hanya sebanyak 10 ribu untuk seluruh Indonesia.

Jika melihat data pengajuan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di provinsi Jawa Barat, ada sebanyak 7.750 peserta di seluruh Indonesia, dimana prosentasi terbanyak ada di Banten dengan 26,92 persen, diikuti provinsi Jawa Barat dengan 20,37 persen, Jawa Timur 17,82 persen, DKI Jakarta dengan 16 persen dan Jateng dan DIY sebanyak 6,79 persen.

Langkah antisipasi pemerintah untuk menjawab tantangan dan peluang dibidang ketenagakerjaan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja sumberdaya manusia. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang ditawarkan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap dampak ancaman resesi global di tahun 2023 bagi pembangunan ketenagakerjaan ini, maka Komisi IX DPR RI dalam masa sidang II Tahun sidang 2022 – 2023 ini akan melaksanakan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan pemenuhan hak-hak normative dan kemanfaatan atas program Jaminan social bagi seluruh pekerja baik JHT dan JKP serta mencari langkah dan kebijakan terhadap pekerja ter PHK yang tidak berhak mendapat JKP, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam perlindungan pekerja dimasa yang datang.

II. LANDASAN

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 61 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100.
2. Kesimpulan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 01 November 2022.

III. TUJUAN

1. mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang antisipasi ancaman resesi global tahun 2023 terhadap pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat.
2. mendapatkan informasi mengenai data dan jumlah perusahaan, koperasi, usaha kecil, menengah dan pekerja/buruh yang terdampak ancaman resesi global tahun 2023 dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dan menjadi beban pemerintah kabupaten Bogor.
3. mendapatkan informasi dan penjelasan secara komprehensif tentang kendala serta kebijakan yang di ambil untuk antisipasi ancaman resesi global tahun 2023 terhadap pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat.

IV. KELUARAN

Rekomendasi Komisi IX DPR RI yang diharapkan akan menjadi:

1. Masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Keteangakerjaan dan pihak terkait lainnya.dalam menghadapi ancaman resesi global Tahun 2023
2. Masukan bagi mitra kerja Komisi IX DPR RI terkait dampak resesi ekonomi global dan kerugian ekonomi yang dihadapi masyarakat.
3. Sebagai landasan untuk meningkatkan perlindungan pekerja terhadap dampak resesi ekonomi global Tahun 2023

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Bogor, didampingi:

Unsur daerah:

1. Kadisnaker kab bogor
2. Kadisnaker kab. Bandung
3. Kadisnaker Kab. Karawang
4. Kadis Koperasi dan UMKM kab Bogor
5. Deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jabar
6. Pengawas ketenagakerjaan prov Jabar
7. APINDO kab Bogor
8. Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB)
9. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kab bogor
10. Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Bogor
11. KSPN Nusantara

Didampingi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI

1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
4. Direksi BPJS Ketenagakerjaan

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 17 November – 19 November 2022

VII. PESERTA

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera UTara dipimpin oleh Pimpinan Komisi IX DPR RI, EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

VIII. GAMBARAN UMUM

LETAK GEOGRAFIS

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas 298.838,304 Ha. Secara geografis terletak antara 6 18'0"LU - 6 47'10" LS dan 106 23'45" - 107 13'30" Bujur Timur dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28 %, 42,62% berada pada ketinggian 100 - 500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000 - 2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada

ketinggian 2.000 - 2.500 meter dpl. Kabupaten Bogor memiliki batas strategis yaitu di sebelah Utara Kota Depok, Barat dengan Kabupaten Lebak, Timur dengan Kabupaten Karawang, dan Selatan dengan Kabupaten Sukabumi



WILAYAH ADMINISTRATIF

Secara Administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 411 Desa dan 17 Kelurahan (total 428 Desa/Kelurahan), 3.768 RW dan 14.951 RT yang tercakup dalam 40 Kecamatan. Berdasarkan karakteristik wilayah dan untuk memudahkan pengembangannya, maka Kabupaten Bogor dibagi dalam 3 wilayah yaitu: Bogor wilayah Barat, Tengah dan Timur (sumber: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor 2005-2025).

PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DAERAH

Profile Perekonomian

Dalam periode 2014-2018, struktur perekonomian Kabupaten Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan serta transportasi dan pergudangan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 53,94 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,62 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 10,14 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,26 persen, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 3,82 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing berada dibawah 3 persen. Diantara ke lima lapangan usaha tersebut, konstruksi dan transportasi dan pergudangan adalah

kategori yang mengalami peningkatan peranan sehingga sedikit menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor. Sebaliknya, peranan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bogor berangsur turun diantaranya adalah kenaikan biaya faktor produksi yaitu Upah Minimum Regional (UMR) yang menembus angka Rp.3,48 juta per bulan. Begitu juga perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bogor, Jadi Kabupaten Dengan Perekonomian Terbesar Di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor melesat naik pada tahun 2021, setelah sebelumnya sempat anjlok pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor kembali naik signifikan 5,25 persen atau menjadi 3,48 persen. Pasalnya tahun 2020 angkanya anjlok menjadi minus 1,7 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,85 persen.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor tahun 2021 pun tembus di angka Rp245,22 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2020 yang senilai Rp236,15 triliun dan tahun 2019 senilai Rp237,2 triliun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang dirilis pada 2021, menempatkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan perekonomian terbesar ke-2 di Indonesia berdasarkan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni Rp. 236,14 trilyun setelah Kabupaten Bekasi dan berada di atas Kabupaten Karawang. Di Provinsi Jawa Barat ada empat kabupaten yang masuk 10 besar yakni, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung.

Mayoritas dari Kabupaten yang memiliki perekonomian yang besar ditopang oleh sektor pengolahan industri dan sektor pertambangan. Selain itu, sebagian besar wilayah di atas merupakan markas yang beroperasinya perusahaan dan pabrik skala besar.

Keuangan Daerah





Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan (miliar rupiah) di Kabupaten Bogor, 2020 - 2021

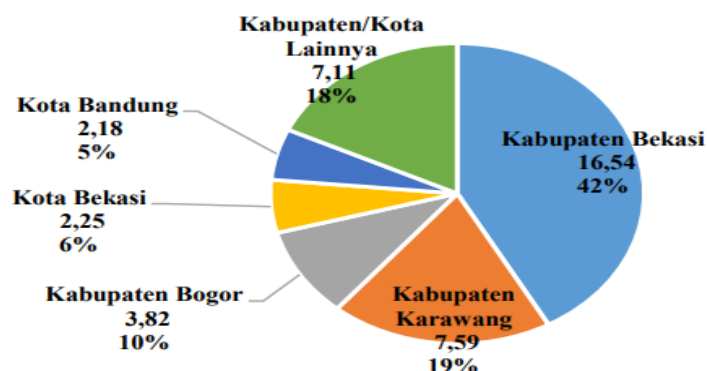
Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	2 810,16	3 689,02
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	1 857,41	2 469,40
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	128,92	307,29
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	67,10	71,30
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	756,73	841,02
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	2 900,88	3 151,79
2.1 Dana Bagi Hasil/Sharing Revenue	249,00	517,72
2.2 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1 849,80	1 863,20
2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik/Physics Special Allocation Fund	83,93	111,46
2.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik/Non Physics Special Allocation Fund	650,95	584,14
2.5 Dana Insentif Daerah/Regional Incentive Fund	67,20	75,27
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	4 877,02	5 128,57
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	596,75	630,06
3.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Transfer Fund from Central Government	3 400,05	3 568,36
3.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah/Transfer Fund from Regional Governments	880,22	930,15
Jumlah/Total	10 588,06	11 969,38

Catatan/Note: Data tahun 2021 masih angka sementara belum hasil audit
Sumber/Source: DJPK, Kementerian Keuangan

Realisasi Investasi PMA-PMDN di Kabupaten Bogor

Berdasar data dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi Jawa Barat, menempati posisi ke tiga terbesar dengan realisasi investasi sebesar 3,81 Triliun Rupiah dan berproporsi secara keseluruhan sebesar 9,67% dengan 1.001 proyek. Sementara realisasi investasi yang bersumber dari PMDN, Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki proporsi di atas 5 persen, yaitu 15,60 persen. Jumlah tersebut berada pada posisi ke dua setelah Kabupaten Bekasi dengan realisasi investasi sebesar 47,44 persen.

**Realisasi Investasi PMA-PMDN Berdasarkan
Kabupaten/Kota Triwulan I 2022**



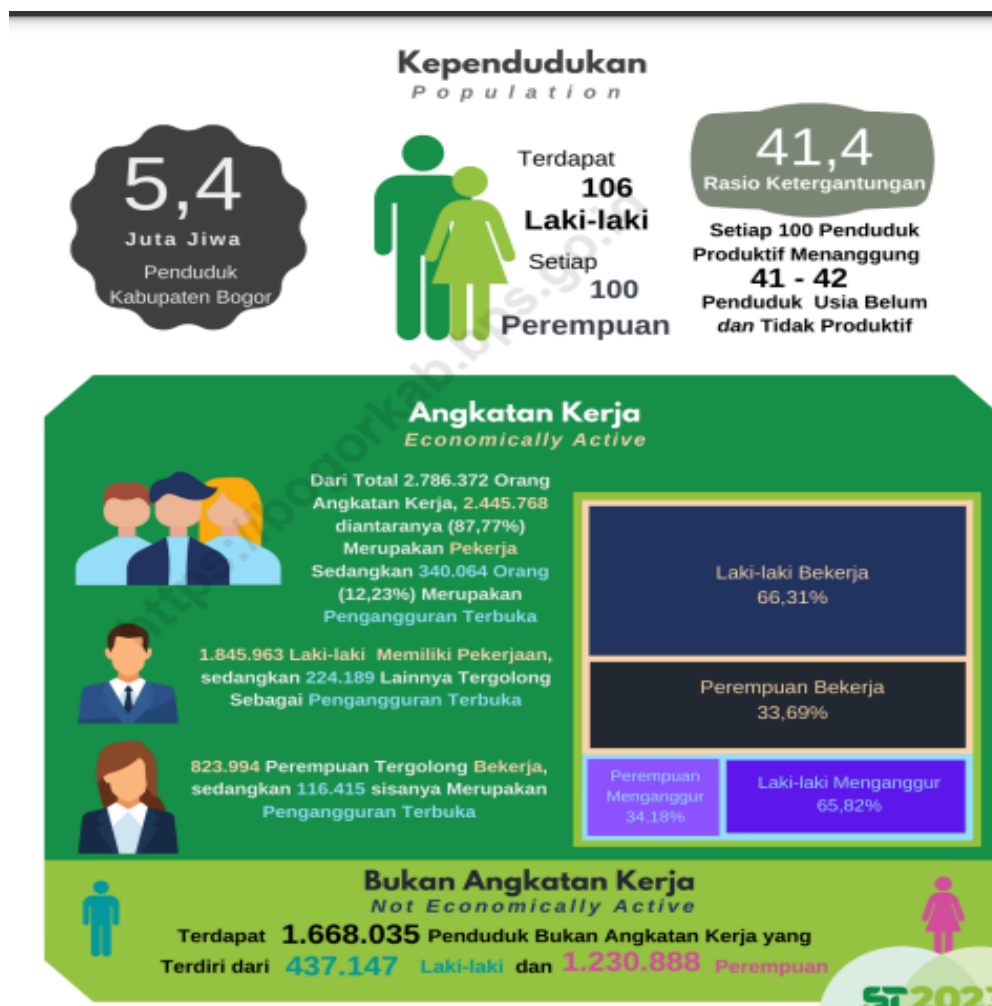
PENDUDUK, DAN KETENAGAKERJAAN

Kependudukan

Kondisi Demografis Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang keadaan komposisi distribusi dan kecepatan penduduk di suatu daerah, yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 4.763.209 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.446.251 jiwa dan penduduk perempuan 2.316.958 jiwa. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan bilamana dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2009 yang berjumlah 4.477.296 jiwa maupun penduduk pada tahun 2008 yang berjumlah 4.302.974 jiwa. Kondisi ini menyebabkan tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu periode 2000-2010 yaitu mencapai 3,13%.

Data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor adalah sebesar 1,06, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 106 orang laki-laki. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio di atas 1, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.



Ketenagakerjaan

Struktur penduduk menurut pekerjaan

Partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk berumur 10 tahun lebih. Tahun 2005 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Bogor untuk laki-laki 75,13 persen, perempuan 32,92 persen, dan secara total 54,67 persen. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 991.634 orang untuk laki-laki, 339.680 orang untuk perempuan dan 1.331.314 orang untuk total Kabupaten Bogor. Sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 152.424 untuk laki-laki dan 131.618 untuk perempuan dari 284.042 untuk total Kabupaten Bogor.

Penduduk di Kabupaten Bogor banyak yang bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja setelah sektor perdagangan. Jika dibandingkan dengan sektor lain yang terdapat di Kabupaten Bogor, sektor pertanian memiliki urutan ke dua dalam menyerap tenaga kerja.

Penduduk usia kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor tahun 2018, sebanyak 3,9 juta atau 68,27 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor yaitu 5,8 juta orang, atau sebanyak 2,9 juta (68,96 persen) dari total penduduk Kabupaten Bogor tanpa Bogor Barat. Dimana 75 persen dari jumlah penduduk usia kerja

bertempat tinggal pada Kabupaten Bogor tanpa Bogor Barat. Sementara jumlah angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 2,537 juta, dimana 188.161 orang atau 7,4 persen merupakan pengangguran. Berdasarkan hasil sakernas tahun 2012, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bogor sebesar 65,11 persen yang artinya 65,11 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor terlibat dan berusaha dalam kegiatan produktif menghasilkan barang dan jasa. TPAK tahun 2012 meningkat bila dibandingkan TPAK tahun 2011 yang sebesar 62,54 persen. TPAK Kabupaten Bogor tahun 2012 berada diatas TPAK Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 63,78 persen, namun masih dibawah TPAK nasional sebesar 67,88 persen.

Distribusi penduduk

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bogor adalah 5.427.068 jiwa. Jumlah tersebut adalah terbanyak di provinsi Jawa Barat dan di Indonesia.

IX. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Dalam pertemuan yang diadakan di ruang rapat Bupati Bogor, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang difasilitasi Plt Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah (Sekda) pemerintah Kabupaten Bogor, disampaikan data-data kondisi pembangunan ketenagakerjaan dan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja di abupaten Bogor sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan Disnaker Kabupaten Karawang

a. Disnaker Kabupaten Bogor

Kondisi tingkat pengangguran terbuka pada masa pandemi tahun 2020 14,29% atau 390.731 dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12,22% atau 340.604 dan di targetkan pada tahun 2022 menjadi 11,64% pada 11,05% sumber data BPS dan RPJMD.

Data jumlah perusahaan dan pekerja di Kabupaten Bogor dalam 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja yang dirumahkan	Jumlah Pengurangan Karyawan	Jumlah Pekerja Ter-PHK
2020-2021	167	10.271	-	1.966
2022	30	-	17.509	-
	9	-	-	6.178

Sumber data perusahaan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat

Dalam kondisi saat ini, ada sebanyak 9 perusahaan yang telah tutup operasional produksi dari total 1.596 perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, dengan pekerja yang terdampak berjumlah mencapai 6.178 orang.

Perkembangan pembangunan ketenagakerjaan sebagai dampak resesi ekonomi global di Kabupaten Bogor, yaitu ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK dan rencana perusahaan yang pindah ke daerah/wilayah yang upah minimumnya lebih rendah dari pada Kabupaten Bogor.

Upaya pemerintah dan alokasi anggaran menghadapi kondisi ekonomi

Pemerintah Kabupaten Bogor secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan upaya dalam menghadapi resesi ekonomi adalah Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Upaya Daerah dengan menggerakkan sector pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian dan industry manufaktur.

Alokasi anggaran

Program/kegiatan yang dialokasikan dalam pemulihan ekonomi daerah pada tahun 2022 meliputi 56 program, 98 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 Trilyun. Sementara Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi Pencari Kerja dengan jumlah 1.080 orang dan Perluasan Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja Mandiri dengan jumlah 800 orang.

Adapun beberapa dukungan pemerintah kepada perusahaan dan pekerja dalam menghadapi dampak ancaman resesi ekonomi global yaitu

- 1) Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mencantumkan struktur skala upah dalam pengesahan peraturan perusahaan.
- 2) Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk perusahaan dan pekerja.
- 3) Optimalisasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Bogor
- 4) Optimalisasi Bogor Career Center
- 5) Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Disnaker Kabupaten Bogor melakukan pelatihan kepada pencari kerja/pengangguran dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk bisa bersaing dengan dunia usaha, dan melaksanakan perluasan kesempatan kerja dengan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk menjadi Tenaga Kerja Mandiri dan menghasilkan uang sendiri melalui program Pembentukan wirausaha baru.

Dampak ancaman resesi yang sudah dirasakan baik oleh perusahaan dan pekerja

Perusahaan mengalami pengurangan pemesanan dari luar negeri yang telah lebih dulu terdampak resesi ekonomi. Beberapa telah menutup operasional produksi hingga melakukan PHK karena belum mendapat order pekerjaan untuk tahun depan. Ada juga beberapa perusahaan yang melakukan realokasi ke daerah-daerah dengan biaya operasional dan upah pekerja lebih rendah.

b. Disnaker Kabupaten Karawang

Karawang merupakan pusat industri di Indonesia bahkan di Asia, dengan total perusahaan berjumlah 13.600 perusahaan. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten dengan UMK tertinggi di Indonesia, yaitu Rp.4,7 juta. Dengan persoalan ekonomi saat ini, disatu sisi permintaan dan pendapatan perusahaan menurun, di sisi lain, dorongan pekerja yang meminta kenaikan upah. Dengan upah yang tinggi, maka sebagai industri padat karya, maka akan sulit untuk bertahan.

Salah satu perusahaan besar di Karawang yang terimbas ancaman resesi ekonomi global yaitu PT Chan Shin dimana keuangan sudah mulai goyah, yang berdampak kepada 16 ribu atau 50 persen pekerja. Bahkan tahun depan, sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembayaran upah karena tidak adanya order atau pesanan dari Eropa.

Begitu juga dengan kasus PT Densus, perusahaan pembuat sepatu Nike, dengan jumlah 3.900 pekerja yang terdampak dan berencana untuk merelokasi perusahaan ke daerah Cirebon. Namun pengurangan 3.900 pekerja tersebut, tidak menimbulkan gejolak karena perusahaan telah menyelesaikan hak pekerja dengan baik.

Sementara untuk industri padat modal (otomotif), masih berjalan di tahun 2022 ini, masih ada lowongan kerja bahkan penyerapan lapangan kerja terjadi pada 14.500 orang pekerja di perusahaan otomotif di Karawang.

2. Dinas Koperasi dan UMKM

Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor

Jumlah koperasi dari Tahun 2020 – 2022 sebanyak 1993 Koperasi Aktif. Sementara jumlah UMKM dari Tahun 2020 – 2022 sebanyak 28.857 UMKM. Sesuai dengan jati diri koperasi serta prinsip koperasi dari hulu ke hilir dari berbagai sektor, namun masih banyak permasalahan dan kendala terlebih SDM dan permodalan serta komitmen semua pihak dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi pada umumnya.

Dampak ancaman resesi ekonomi global terhadap koperasi dan UMKM, serta bentuk dukungan program dan anggaran

Resesi ekonomi global tentunya akan berdampak pada kelangsungan usaha Koperasi dan UMKM terutama pada sektor tenaga kerja, PHK semakin banyak dan angka pengangguran semakin meningkat, sehingga akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, biaya produksi meningkat dan pemasalahan lain yang diprediksi akan timbul yaitu masalah cash flow para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM.

Dukungan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro yaitu dengan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penguatan dan pemberdayaan dalam bentuk penguatan legalitas, sertifikat halal, PIRT, Kemitraan, mengadakan event-event seperti pameran, Festival dan bantuan peralatan produksi, sarana pemasaran serta fasilitasi permodalan.

Dukungan anggaran tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan dan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM sebesar 30,3% dari total anggaran Dinas.

Upaya dinas Koperasi dan UMKM dalam mengantisipasi dampak ancaman resesi ekonomi

Dalam mengantisipasi dampak yang timbul resesi ekonomi global Tahun 2023 dinas koperasi dan UMKM telah berupaya memprogramkan berbagai kegiatan pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penguatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan harapan para pelaku usaha tersebut bisa meningkatkan perannya dan bisa tumbuh serta berkembang, yang tentunya kami tidak bisa sendirian tapi butuh dukungan serta komitmen dari berbagai pihak untuk selalu berkolaborasi dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

3. BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dan yang terdampak serta mendapatkan manfaat JKP

Kepatuhan perusahaan dan pekerja/buruh untuk mengikuti program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor untuk Perusahaan yang berskala Besar dan Menengah telah terdaftar menjadi peserta, dan masih terdapat potensi sebanyak 1.339 badan usaha dengan 40.833 pekerja.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kabupaten Bogor terdiri dari 152 jenis usaha, dengan jumlah PK/BU sebanyak 5.889 perusahaan dan tenaga kerja aktif sebanyak 276.292 orang. Untuk PK/BU yang berskala Besar dan Menengah telah terdaftar menjadi peserta, namun untuk PK/BU Kecil dan Mikro masih banyak yang belum menjadi peserta.

Jumlah perusahaan yang sudah menghentikan operasional perusahaan dan mem PHK pekerja di Kabupaten Bogor sampai saat ini terdapat 1 perusahaan skala besar dengan tenaga kerja sebanyak 310 orang yang berhenti operasional, yaitu PT. Cresyn Indonesia. Dengan jumlah peserta yang telah mendapatkan manfaat JKP sebanyak 256 orang dengan nilai manfaat sebesar Rp2.009.152.150,-

Ancaman resesi ekonomi yang terjadi secara global saat ini sudah dirasakan dengan indikasi banyak pekerja yang keluar dibandingkan pekerja yang masuk bekerja.

Upaya yang dilakukan BPPJS Ketenagakerjaan

Melakukan komunikasi dengan perusahaan melalui kunjungan CRM untuk menggali informasi terkait kondisi perusahaan saat ini dan kedepannya, serta melakukan koordinasi dengan Disnaker dan Apindo.

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendorong diterbitkannya aturan/regulasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja informal dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4. Apindo Kabupaten Bogor

Dampak ancaman resesi ekonomi global bagi perusahaan di Kabupaten Bogor

Sejak dimulainya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020, mengalami penurunan pemasaran hasil produksi baik ekspor maupun dalam negeri mengalami antara 30% sd 70%. Selain itu, 80% perusahaan mengalami penurunan pendapatan, serta angka pertumbuhan ekonomi pernah sampai mencapai – (minus) 2,7%.

Dengan kondisi penerimaan perusahaan yang mulai menurun, maka asosiasi pengusaha di Kabupaten Bogor meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang jam kerja, yaitu mengurangi jumlah jam kerja perminggu dari 40 jam menjadi 30 jam guna menghindari terjadinya PHK oleh perusahaan.

Apindi juga mengakui bahwa kenaikan besaran upah selama ini berlaku kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dan bukan berdasar pada UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya menyalahi aturan dan melanggar hukum. Namun diakui bahwa hal tersebut menjadi jalan keluar agar perusahaan tidak berhenti operasi.

5. Perwakilan Serikat Pekerja

Salah satu perwakilan Serikat Pekerja di Kabupaten Bogor menyampaikan beberapa persoalan terjadinya pengurangan pekerja oleh beberapa perusahaan. Namun pengurangan pekerja tersebut tentunya tidak disebabkan karena dampak resesi ekonomi global sebagaimana yang disampaikan pengusaha. Karena kondisi ekonomi Indonesia sendiri masih menunjukkan adanya pertumbuhan.

Yang terjadi saat ini adalah adanya pengurangan 172 ribu pekerja yang telah habis kontrak dan bukan karena resesi. Setelah kontrak mereka dihentikan, maka perusahaan akan merekrut pekerja baru.

Salah satu cara mengantisipasi agar tidak terjadi resesi ekonomi adalah dengan menaikkan upah pekerja, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Diharapkan upah pekerja di tahun 2023 ada kenaikan, tidak seperti tahun 2022 yang tidak naik.

X. TEMUAN

Dari pembahasan yang dilakukan, di dapat beberapa temuan terkait ancaman resesi ekonomi global 2023, yaitu:

1. Berdasar data Pemerintah Kabupaten Bogor, total pengurangan pekerja di Kabupaten Bogor saat ini sebanyak 23.687 orang dimana 17.509 orang ter PHK dari 30 perusahaan dan 6.178 pekerja dari 9 perusahaan yang tidak beroperasi/tutup.
2. Program dan Kegiatan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengantisipasi dampak ancaman resesi ekonomi global di Kabupaten Bogor melalui *Program Satu Miliar Satu Desa (Sami Sade)*, yaitu untuk program padat karya bagi pekerja.
3. Provinsi Jawa Barat merupakan pusat industri tujuan export. Saat ini, negara tujuan export sedang terdampak resesi ekonomi dan mengurangi permintaan produksi. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, 80 persen perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan penurunan pemasaran hasil produksi baik untuk ekspor maupun dalam negeri antara 30 persen sampai dengan 70 persen.
4. Melihat kondisi ekonomi saat ini, salah satu antisipasi atau strategi perusahaan dalam menekan tingginya biaya operasional perusahaan dan upah dan agar tidak terjadi layoff, yaitu melakukan realokasi perusahaan ke daerah dengan biaya operasional yang rendah/murah. Realokasi perusahaan ini sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Bogor ke Jawa Tengah.
5. Dukungan anggaran tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan dan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM sebesar 30,3% dari total anggaran Dinas.

6. Selain pengurangan pemesanan barang untuk export dan dalam negeri yang membuat kondisi ekonomi semakin tidak pasti, membanjirnya produk impor garmen dari China di pasar domestik dengan harga yang murah, menambah persoalan perusahaan manufaktur yang terimbas efek domino persoalan di atas.
7. Melihat struktur pendidikan pekerja di Kabupaten Bogor yang di dominasi pekerja lulusan Sekolah Dasar, maka pemerintah kabupaten perlu memetakan dan mempertimbangkan jenis industri apa yang cocok bagi pekerja dengan pendidikan SD.
8. Dalam kondisi seperti ini, perwakilan pengusaha meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan kebijakan berupa bantuan insentif dan stimulus bagi perusahaan dan mempermudah pemberian ijin dan investasi. Sebab birokrasi perijinan dan investasi masih belum sepenuhnya dapat mengimbangi kesulitan dunia usaha.
9. Untuk kenaikan besaran upah pekerja, pengusaha di Kabupaten Bogor masih memberlakukan mekanisme berdasar asas kesepakatan dengan pekerja dan bukan berdasar ketetapan UMK dari pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari penutupan operasional perusahaan. Mekanisme melalui kesepakatan ini secara hukum tentunya salah karena bertentangan dengan ketentuan UU.
10. Menurut Serikat Pekerja, resesi ekonomi tidak berdampak pada PHK Pekerja. Dan data 172 ribu pekerja yang menjadi korban PHK tidak benar. Kondisi di lapangan sebenarnya adalah adanya penghentian kontrak kerja bagi pekerja kontrak oleh perusahaan untuk kemudian perusahaan merekrut pekerja baru.
11. Manfaat JKP yang di provinsi Jawa Barat masih terbilang kecil yaitu hanya 7.000 dengan total Rp 29 miliar. Sementara untuk manfaat JHT yang dicairkan oleh pekerja, tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu hanya 17 persen dari sebelumnya pada masa pandemi mencapai 37 persen.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD terkait serta jawaban tertulis yang disampaikan, berikut kesimpulan dan rekomendasi yang kami berikan:

1. Terkait mekanisme kenaikan upah yang selama ini dilakukan berdasar asas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, jelas melanggar hukum karena tidak ada payung hukum. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera mencari jalan keluar, sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

2. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk melindungi pekerja jika terjadi realokasi perusahaan guna menekan tingginya biaya operasional perusahaan dan upah pekerja, disamping daya beli dan pendapatan perusahaan menurun.
3. Kehadiran UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentunya membuka kemudahan perusahaan untuk merekrut pekerja dengan status outsourcing dan kemudahan pengurangan pekerja melalui penghentian kontrak kerja. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor memberi perhatian dan mendengarkan masukan pekerja sebagai bentuk perlindungan pekerja.
4. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperjelas alasan dilakukannya pengurangan pekerja baik melalui PHK maupun tidak memperpanjang kontrak, serta siapa saja yang boleh menetapkan atau menyatakan perusahaan tersebut dalam kondisi merugi/pailit, yang menjadi alasan perusahaan mem PHK pekerja.
5. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dapat dimanfaatkan kepada pekerja kontrak. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat upaya-upaya dalam rangka memastikan kesejahteraan melalui jaminan sosial pekerja bagi pekerja kontrak.

XII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI kami sampaikan. Atas perhatian, jawaban, serta kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 November 2022

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR
KETUA TIM,**